

**INOVASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER**

**INNOVATION OF LEARNING EDUCATION IN CITIZENS
IN THE FORMATION OF CHARACTERS**

Andi Tabrani Rasyid ¹

¹ School of Teacher Training and Education (STKIP) Muhammadiyah Bone
Corresponding e-mail to : anditabrani_rasyid@yahoo.co.id

Received : October 21, 2019

Accepted : November 18, 2019

Published : November 22, 2019

Abstract

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran PKn diarahkan untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Negara yang baik, cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh dasar ngara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945., Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan pendidikan karakter peserta didik. Namun, kenyataannya pendidikan karakter tidak terlaksana dengan baik dan belum berdampak kepada peserta didik. Hal ini disebabkan dalam proses pembelajaran lebih pada konteks penguasaan materi sehingga pengembangan aspek karakter tidak diperhatikan. Untuk tujuan itu, maka karakter sebagai tatanan pembentukan diri peserta didik dilembaga pendidikan harus mengembangkan tatanan pembelajaran yang kondusif dan bermakna bagi perkembangan nilai-nilai karakter yang muncul dari budaya lembaga pendidikan tersebut.

Kata Kunci: Pembelajaran PKn, karakter bangsa

Abstract

Citizenship Education Learning (PKn) has an important position in the effort to prepare students to become citizens who have a strong and consistent commitment to defend the Unitary Republic of Indonesia. Therefore, Civics Education is directed to form citizens who understand and are able to carry out their rights and obligations to become good, intelligent, skilled and characterized citizens mandated by the principles of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Citizenship Education can serve as a foundation in developing student character education. However, in reality character education is not well implemented and has not yet impacted students. This is due in the learning process more in the context of mastery of the material so that the development of aspects of character is not considered. For this purpose, the character as a structure for the formation of students in educational institutions must

develop a learning order that is conducive and meaningful for the development of character values that emerge from the culture of the educational institution.

Keywords: *Learning Civics, national character*

Pendahuluan

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah dalam suatu negara untuk menjamin kehidupan dan kelangsungan hidup generasi penerusnya. Pendidikan yang berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) akan membuat mereka mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional.

Di Indonesia tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri pada peserta didik yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa yang menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan nilai secara kurikuler terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nilai yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu nilai religiusitas, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kapedulian, demokratis, nasionalis, kepatuhan terhadap aturan sosial, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Nilai-nilai ini yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Pendidikan karakter yang diselipkan dalam mata kuliah PKn diharapkan mampu membentuk mahasiswa yang berkarakter baik. Mata Kuliah PKn sebagai mata kuliah wajib di semua jenjang pendidikan (mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi) dalam setiap proses pembelajarannya harus bernuansa pengembangan karakter bagi peserta didik. Menurut Aisyah (2015) Pendidikan karakter dimaknakan sebagai

pendidikan yang mengajarkan serta selalu meningkatkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, hingga akhirnya peserta didik mampu mengaplikasikan karakter-karakter luhurnya dalam kehidupan sehari, baik di dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga Negara.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan nilai karakter bangsa teridentifikasi sejumlah nilai sebagai berikut.

1. Religius: Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi: Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku etnis, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda darinya.
4. Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif: Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri: Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas.
8. Demokrasi: Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin tahu: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.
10. Semangat kebangsaan: Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa, diatas kepentingan kelompok maupun individu.
11. Cinta tanah air : Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

12. Menghargai prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/komunikatif: Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.
14. Cinta damai: Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar membaca: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijaksanaan bagi dirinya.
16. Peduli lingkungan: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli sosial: Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung jawab: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya) , negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

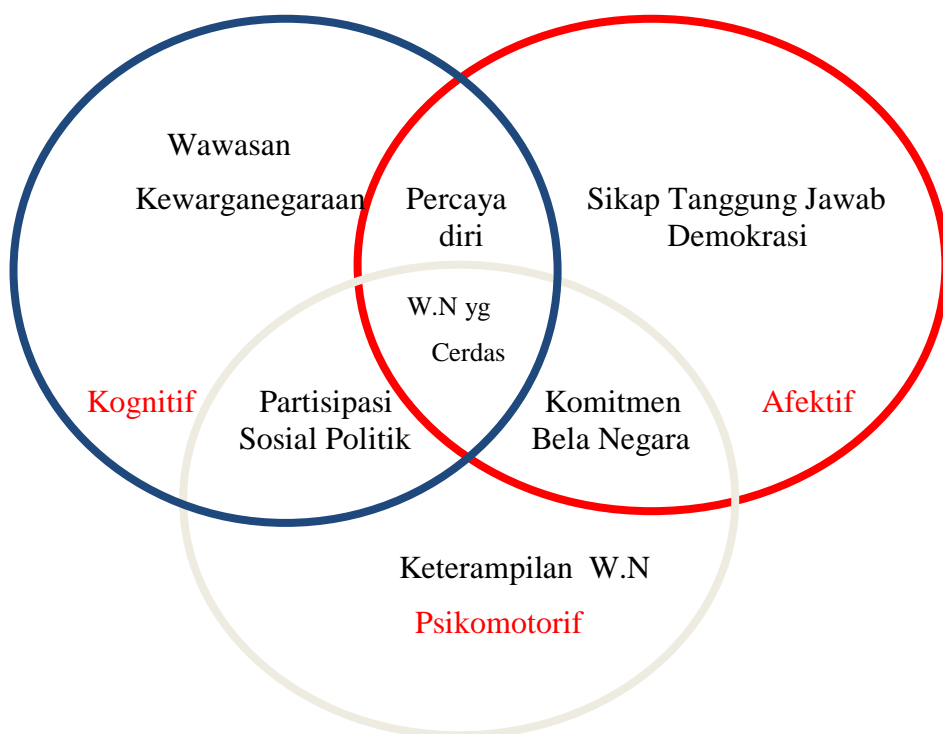
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memuat materi Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- 2) Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- 4) Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.

B. Tinjauan Pustaka

1) Sasaran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Sasaran utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretoskerja, professional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Seperti digambarkan dalam diagram berikut ini:



Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki enam jenjang atau aspek, yaitu:

1. Pengetahuan/hafalan/ingatan (*knowledge*)
2. Pemahaman (*comprehension*)
3. Penerapan (*application*)
4. Analisis (*analysis*)
5. Sintesis (*syntesis*)
6. Penilaian/penghargaan/evaluasi (*evaluation*)

Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut mahasiswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi.

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku.

Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima jenjang, yaitu:

1. *Receiving atau attending (menerima atau memperhatikan)*
2. *Responding (menanggapi)* mengandung arti “adanya partisipasi aktif”
3. *Valuing (menilai atau menghargai)*
4. *Organization (mengatur atau mengorganisasikan)*
5. *Characterization by value or value complex* (karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai).

Ranah psikomotorif merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorif ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku). Ranah psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya.

Hasil belajar keterampilan (psikomotorif) dapat diukur melalui: (1) pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung, (2) sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap, (3) beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya.

Melalui Pendidikan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh

masyarakat bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Edmonson (sebagaimana dikutip A. Ubaedillah 2011: 5) makna Civicsselalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut: a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersamadengan bangsa-bangsa lain. d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3).

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dandemokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab (A. Ubaedillah 2011: 9).

Dari berbagai pendapat di atas bahwa PKn bertujuan untuk: a) menjadikan warga negara Indonesia yang kritis, rasional, kreatif, cerdas, aktif, dan demokratis, b) berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab, d) berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2) Pembinaan Karakter

Secara etimologis, kata karakter bisa berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau watak (Tim Redaksi Tesaurus, 2008: 229). Orang berkarakter berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti ini berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir (Koesoema, 2007:80).

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona. Menurutnya karakter adalah *“A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way.”* Selanjutnya ia menambahkan, *“Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior”* (Lickona, 1991:51). Menurut Lickona, karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), motivasi (*motivations*), serta perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*).

Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu (Kertajaya, dalam Yanty Rosdiana Barutu, 2017: 450). Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap (Gulo, 2002: p.29)

Pembudayaan karakter (akhlak) mulia perlu dilakukan. Terwujudnya karakter (akhlak) mulia yang merupakan tujuan akhir dari suatu proses pendidikan sangat didambakan oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan proses pendidikan. Budaya atau kultur yang ada di lembaga, baik sekolah, kampus, maupun yang lain, berperan penting dalam membangun akhlak mulia di kalangan sivitas akademika dan para karyawannya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan akhlak (pendidikan moral) bagi para peserta didik dan juga membangun kultur akhlak mulia bagi masyarakatnya (Marzuki, dkk, 2011: 47).

Setiap individu memiliki ciri, sifat bawaan (*heredity*), dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Ahli psikologi berpendapat bahwa kepribadian dibentuk oleh perpaduan faktor perpaduan faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Karakteristik bawaan, baik yang bersifat biologis maupun psikologis, dimiliki sejak lahir. Apa yang dipikirkan, dikerjakan, atau dirasakan seseorang atau merupakan hasil perpaduan antara apa yang ada diantara faktor-faktor biologis yang diwariskan dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Karakter seseorang baik disengaja atau tidak, didapatkan dari orang lain yang sering berada didekatnya atau yang sering mempengaruhinya, kemudian ia mulai meniru untuk melakukannya. Oleh karena itu, seorang anak yang masih polos seringkali akan mengikuti tingkah laku orang tuanya atau teman mainnya, bahkan pengasuhnya. Erat kaitan dengan masalah ini, seorang psikolog berpendapat bahwa karakter berbeda dengan kepribadian, karena kepribadian merupakan sifat yang dibawa sejak lahir dengan kata lain kepribadian bersifat genetis (Yanty Rosdiana Barutu, 2017: 450).

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan (Depdiknas, 2003: 20). Sedangkan menurut Djahiri (2005: 2) evaluasi pembelajaran PKn merupakan momentum/instrumen untuk mengukur/menilai tingkat keberhasilan, kegagalan, kelebihan atau kekurangan proses dan hasil belajar serta momentum untuk melakukan *relearning* yang bersifat kontinyu, multidimensional, dan terbuka. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya evaluasi kompetensi pembelajaran dapat diukur ketercapaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di MTs. Mathlaul Anwar Kota Pontianak bahwa pengajar PKn sudah melakukan pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn diaktualisasikan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. setiap tahapan dalam pembelajaran harus mampu memuat dan menggali nilai-nilai karakter yang hendak dicapai. Pada tahap awal, yaitu perencanaan pembelajaran dilakukan penyusunan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan bahan ajar. Ketiga hal tersebut, baik silabus, RPP, dan bahan ajar dirancang agar muatan dan kegiatan pembelajaran nya memfasilitasi/berwawasan pendidikan karakter. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pembuatan silabus, RPP, dan bahan ajar bermuatan karakter adalah dengan mengadaptasi

kegiatan pembelajaran yang bersifat memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai karakter. Silabus pembelajaran memuat Kompetensi Dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam kegiatan perencanaan, dapat dilihat dari dokumen pembelajaran PKn yang digunakan oleh pengajar PKn baik dalam silabus dan RPP nya. Pengajar PKn melakukan modifikasi beberapa komponen dalam pembuatan silabus dan RPP dengan menambahkan langsung jenis karakter yang ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran berakhir.

Menurut Gunawan (2012: 226) untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan karakter, setidaknya-tidaknya perlu dilakukan perubahan pada tiga komponen silabus berikut:

1. Penambahan dan/atau modifikasi kegiatan pembelajaran sehingga memuat kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan nilai-nilai karakter yang diinginkan.
2. Penambahan dan/atau modifikasi indikator pencapaian sehingga ada indikator yang terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal pembentukan karakter.
3. Penambahan dan/atau modifikasi teknik penilaian sehingga ada teknik penilaian yang dapat mengembangkan dan/atau mengukur perkembangan karakter.

Ketiga hal yang harus dimodifikasi dalam silabus tersebut menunjukkan bahwa kelemahan dari pendidikan di Indonesia selama ini masih berorientasi pada pencapaian aspek kognitif saja. melalui modifikasi silabus berkarakter diharapkan dapat lebih memuat nilai-nilai karakter yang hendak dicapai.

Sementara itu Suyanto (2010: 22) menyatakan; pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu bukan hanya melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*) saja, tetapi perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*), tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia (Sapriya, 2012: 12).

Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan pendidikan masing-masing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang untuk selanjutnya pada saat ini diperkuat dengan 18 (delapan belas) nilai hasil kajian empirik Pusat

Kurikulum. Nilai prakondisi (*the existing values*) yang dimaksud antara lain takwa, bersih, rapih, nyaman, dan santun (Titik Susiatik. 2013: 41).

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter telah teridentifikasi 18 (delapan belas) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab.

C. Kesimpulan

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan dengan tujuan agar peserta didik memiliki wawasan akan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Segala hal tersebut diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah.
- 2) Pendidikan karakter merupakan konsep yang ditawarkan untuk diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) agar dapat membantu pengembangan karakter siswa. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang secara langsung (eksplisit) mengenalkan nilai-nilai, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai. Konsep integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn adalah penginternalisasian atau penguatan nilai karakter ke dalam pembelajaran PKn sehingga hasilnya diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, terbentuknya karakter dan pembiasaan nilai karakter ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali M. Harisa dan Mustari. 2010. *Pendidikan Kewargaan*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Andrian, 2017. *Pengembangan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus pada SD Islam Al-Azhar 30 Bandung)*. UCEJ, Vol. 2 No. 1, April 2017
- C.S.T. Kansil dan Chirstine S.T. Kansil. 2011. *Empat pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dali Gulo. 2002. *Kamus Psikologi*. Bandung: Penerbit Tonis

- Djahiri, A.K. (2006). *Pendidikan Nilai dan Moral dalam Dimensi PKn*. Bandung : Lab. PKn UPI.
- Gunawan, H. 2012. *Pendidikan Karakter (Konsep dan Implementasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Koesoema, Doni A. 2007. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Lickona, Thomas. 1991. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Marzuki, dkk, 2011. *Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama*. JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 41, Nomor 1, Mei 2011
- Muhammad Anwar Rubei, 2015. *Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PKn untuk Mengembangkan Kemandirian Siswa di MTs. Mathlaul Anwar Kota Pontianak*. SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial, Vol. 2, No. 2, Desember 2015
- Sapriya, 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- Suyanto, 2010, *Urgensi Pendidikan Karakter*, dalam diakses tanggal 18 Februari 2012
- Tim Redaksi Tesaaurus Bahasa Indonesia. 2008. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Titik Susiatik, 2013. *Pengaruh Pembelajaran PKn Terhadap Pembentukan Karakter Siswa* Majalah Ilmiah Pawiyatan Vol : Xx, No : 4, Oktober 2013
- Yanty Rosdiana Barutu, 2017, *Pembelajaran Ppkndan Pembentukan Karakter Siswamelalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match*. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017Vol. 1 No. 1 2017
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Peemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi